

Penguatan dan Perlindungan Keluarga Melalui Kegiatan Sarasehan Bagi Kader TP PKK di Desa Karangkamiri

Dede Nurul Qomariah¹, Asep Saepurrohman², Fina Rahmat Rahayu³, Indah Permata Sholihah⁴, Irpan Ilmi⁵,
Jijan Nurjaman⁶, Komaludin⁷

^{1,4}Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia

^{2,3,5,6,7}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia

Email Corresponding: dedenurul@stitnualfarabi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Keluarga,
kader PKK,
perlindungan keluarga,
sarasehan

Kader PKK sebagai agen sosial terdekat dengan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menguatkan keluarga dari berbagai ancaman dan keterpaparan negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberikan penguatan pemahaman terkait perlindungan keluarga. Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini memuat beberapa hal yakni: a) kerangka pemecahan masalah, b) rencana kegiatan pengabdian, c) waktu dan tempat pengabdian, d) prosedur kegiatan dan target capaian. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran pada bulan Februari 2023. Target luaran yang hendak dicapai yakni: adanya persamaan persepsi kader PKK dalam rangka upaya perlindungan keluarga, penguatan pemahaman kader PKK dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat, hingga upaya yang dapat dilakukan kader PKK dalam melindungi keluarga disekitarnya. Kesimpulannya pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan ternyata relevan dengan kebutuhan belajar para kader PKK, karena materi yang disampaikan selaras dengan tugas dan fungsi mereka di masyarakat, salah satunya yakni tentang perlindungan keluarga.

ABSTRACT

Keywords:

Family,
PKK cadres,
Family protection,
Workshop

The PKK cadres as social agents closest to the family have a very important role to strengthen the family from various negative threats and exposure. Therefore efforts are needed to provide strengthening of understanding related to family protection. The implementation method in this service includes several things, namely: a) problem solving framework, b) service activity plans, c) time and place of service, d) activity procedures and achievement targets. This service was carried out in Karangkamiri Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency in February 2023. The output targets to be achieved are: there is a common perception of PKK cadres in the context of efforts to protect families, strengthening the understanding of PKK cadres in carrying out their duties in the community, to the efforts that can be made PKK cadres in protecting the families around them. In conclusion, the implementation of the service activities carried out turned out to be relevant to the learning needs of PKK cadres, because the material presented was in line with their duties and functions in society, one of which was against family protection.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Menurut Hufad (dalam Aziz, 2015, hlm. 15) keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan

reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau diadopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan penguatan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan suatu keluarga sebagai salah satu sistem fungsional untuk mampu bertahan dan pulih dari tantangan hidup yang penuh dengan tekanan (Hawley & Deehan, 1996, hlm. 283-298). Ketahanan keluarga bisa juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana suatu keluarga mampu bertahan menghadapi setiap problematika didalam keluarganya. Konsep ketahanan keluarga memberikan perspektif berbasis kekuatan yang relevan untuk mengenali transisi multigenerasi dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga seiring dengan bertambahnya usia mereka (Averria Sirkin Martin, Brian J. Distelberg & Joana Abed Elahad, 2015). Selanjutnya menurut Sunarti (2001) ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga seiring dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga. Singkatnya Sunarti (2014, hlm. 2) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga untuk mengelola sumberdaya dan masalah yang dihadapi seluruh anggota keluarga.

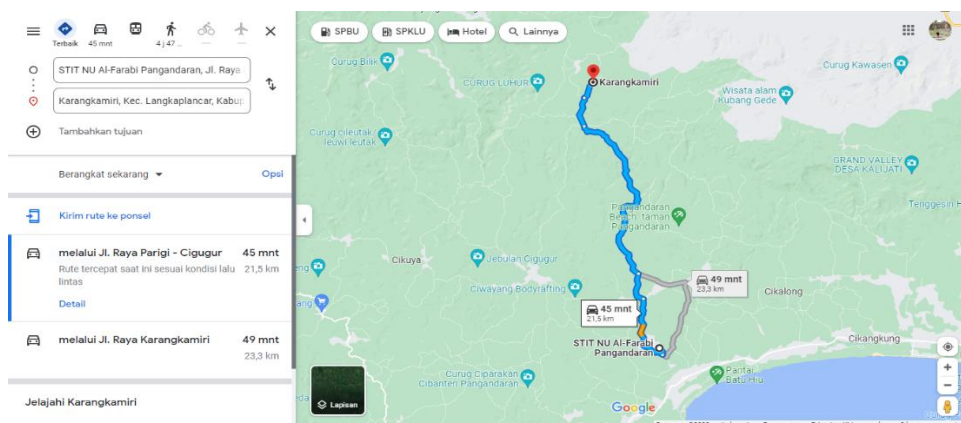
Upaya penguatan dan perlindungan keluarga sebetulnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah yang dimulai sejak disahkannya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada awalnya undang-undang ini fokus pada pembangunan kesejahteraan keluarga yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economycal well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological-spiritual well-being*). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, pada pasal 11 disebutkan bahwa pembangunan keluarga dapat dilakukan melalui pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan dirinya dan keluarganya. Selanjutnya ditingkat provinsi, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Jawa Barat rangka pembangunan ketahanan keluarga dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu dengan mengesahkan motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR). Motivator ketahanan keluarga atau merupakan kader pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat, yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga prasejahtera dan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya agar lebih baik (BP3AKB, 2014, hlm. 19). Selain motekar ada yang dinamakan dengan kader PKK.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu komunitas yang melakukan gerakan di masyarakat yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Tim penggerak PKK terdapat dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan dan juga terdapat kelompok-kelompok kerja. Misi kader PKK, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan (Dahniar, 2014, hlm. 8). Melalui peran kader PKK di masyarakat, mereka dapat menjangkau masyarakat secara luas, sehingga menjadikan PKK luwes bergerak guna menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat sebagai garda yang dekat dengan masyarakat bersamaan dengan motekar sebagai agen social yang melindungi keluarga Indonesia. Untuk itu kami tim pengabdian pada masyarakat (PPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran mengangkat tema pemberdayaan keluarga sebagai upaya penguatan dan perlindungan keluarga melalui kegiatan sarasehan bagi kader PKK di Desa Karangkamiri.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, dalam rangka peninjauan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, maka ditemukan beberapa permasalahan diantaranya yakni:

1. Wilayah yang luas dan jumlah penduduk banyak menyebabkan sulitnya mengurus masyarakat;
2. Budaya masyarakat yang kerap kali bertentangan dengan agama, sehingga pola pikir masyarakat setempat sering bertolak belakang antara agama dan budaya;
3. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDN Karang Kamiri, minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sehingga pola asuh berbeda antara orangtu-guru, dan lingkungan;
4. Rendahnya pemahaman SDM di kalangan pemuda karang taruna sehingga belum bisa mengelola kegiatan/program dengan baik;
5. Karang taruna belum berperan aktif dalam membangun SDM pemuda, sehingga pengelolaan karang taruna baik dari segi SDM dan program di Desa Karang Kamiri masih terbilang pasif;
6. Kader PKK belum memahami konsep ketahanan keluarga;
7. Belum ada ada kegiatan bagi para kader PKK tentang materi perlindungan keluarga.



Gambar 1. Lokasi Tempat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

III. METODE PELAKSANAAN

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencapai 50 orang kader PKK yang menjadi perwakilan dari enam dusun yang ada di wilayah Desa Karangkamiri. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, pada bulan Februari 2023. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan identifikasi masalah dilapangan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerangka pemecahan yang ditawarkan tim pengabdian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, dan kemampuan kelompok untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kerangka pemecahan masalah disesuaikan dengan hasil identifikasi masalah dilapangan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada. Identifikasi masalah yang ada di Desa Karangkamiri melahirkan suatu pemetaan kerangka pemecahan salah satunya yakni melalui kegiatan “Sarasehan Dalam Upaya Perlindungan Keluarga”. Setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan, tahapan selanjutnya yakni melakukan upaya pendampingan. Pendampingan ini dilakukan dengan harapan bahwa setelah dilaksanakan pemberian stimulus melalui kegiatan sarasehan, maka diharapkan mampu memberikan penguatan pengetahuan dan wawasan para kader PKK dalam melaksanakan peran dan fungsinya di masyarakat, khususnya terkait upaya perlindungan keluarga. Melalui tiga tahapan sebelumnya, maka diharapkan para kader PKK mampu mengelola program kesejahteraan keluarga yang ada di Desa Karangkamiri dengan baik, guna mendukung upaya pemberdayaan keluarga di desa tempat tinggal mereka.

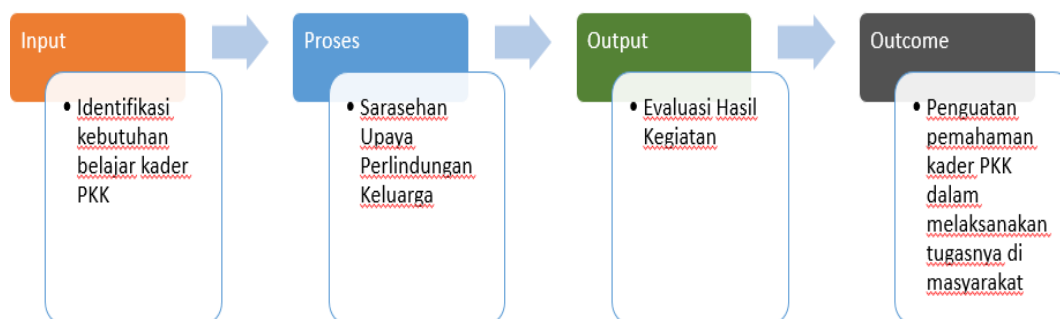
Adapun kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan sarasehan dalam upaya perlindungan keluarga dapat dilihat dari gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

Sedangkan tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian dilakukan melalui dua tahap, yakni:

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan melakukan observasi awal di lokasi tempat KKN yakni di Desa Karangkamiri. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan sebagai data awal mulai dari jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, program-program yang biasa dilakukan, hingga kebutuhan belajar masyarakat. Bersama dengan TP Kader PKK Desa Karangkamiri kami mencoba mengidentifikasi kebutuhan belajar para kader PKK setempat. Hal ini dilakukan guna untuk mencocokkan situasi strategi pembelajaran dengan kebutuhan belajar para kader PKK. Selain itu identifikasi kebutuhan belajar diperlukan dalam perencanaan program pendidikan, salah satunya pendidikan baik yang bersifat penguatan pemahaman maupun dalam merancang program keterampilan yang akan diberikan dalam proses pembinaan menuju kemandirian para kader PKK. Identifikasi kebutuhan belajar juga dimungkinkan untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan program pendidikan yang hendak dicapai. Pada tahap persiapan ini tim pengabdian mengobservasi dengan seksama terkait kebutuhan belajar para kader PKK pada saat ini. Tahap observasi dilakukan dengan menggunakan instrument observasi KKN PAR yakni: gambaran umum desa, letak geografis, sejarah desa, tradisi desa, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, realita keagamaan, dan politik pembangunan. Melalui sepuluh patokan tersebut nantinya diharapkan dapat memudahkan tim pengabdian dalam tahap persiapan pembelajaran yang akan direncanakan.
2. Tahap Pelaksanaan. Untuk memudahkan tim pengabdian dalam tahap pelaksanaan kegiatan sarasehan, dapat dilihat secara detail dalam gambar 3 di bawah ini:

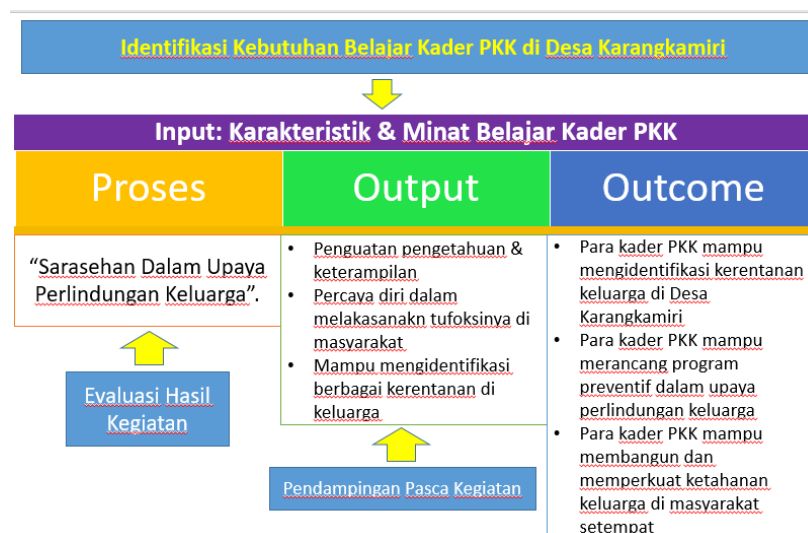


Gambar 3. Desain Pengabdian

Berdasarkan gambar 3 di atas diperoleh informasi bahwa tahap pelaksanaan diawali dengan melakukan

identifikasi kebutuhan belajar kader PKK, yang kemudian dilanjutkan dengan proses menganalisis hasil identifikasi kebutuhan belajar sesuai dengan prosedur dalam tahap persiapan. Pada tahap pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan belajar, kemudian dilakukan pemetaan terkait prioritas pembelajaran yang menjadi kebutuhan para kader PKK. Selanjutnya tim pengabdian merancang program pembelajaran kemudian didiskusikan dengan Ketua TP PKK Desa Karangkamiri selaku pihak mitra. Berbagai program pembelajaran ditawarkan dengan pertimbangan karena pihak mitra lebih mengetahui daya dukung lingkungan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Setelah mitra setuju dengan program pembelajaran yang ditawarkan, maka tim pengabdian menyusun rencana pembelajaran yang berisikan materi serta durasi belajar. Kemudian setelah dilakukan kegiatan sarasehan, maka dilakukan evaluasi melalui wawancara dengan para kader PKK terkait program dan kepuasan mitra dalam penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan tiga proses sebelumnya maka capaian yang diharapkan setelah dilaksanakannya program sarasehan mampu mendorong tercapainya *outcome* dari pembelajaran yang telah terlaksana.

Sedangkan prosedur kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian pada masyarakat diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan belajar warga sasaran di lapangan. Kebutuhan belajar para kader PKK di lapangan tentu sangat kompleks mengingat calon peserta kegiatan adalah kelompok heterogen atau beragam, sehingga memungkinkan perbedaan kebutuhan belajar. Namun tim pelaksana hanya berfokus pada kebutuhan belajar yang bersifat *urgent* dan perlu penanganan tepat sesuai dengan kebutuhan terkini, terutama isu sosial terkini di masyarakat. Tim pelaksana pengabdian memilih skema IPTEK bina bagi masyarakat, karena melihat peluang dari masalah terkait kebutuhan belajar yang terkadang dirasa belum memuaskan. Selain itu terjadinya pergeseran stigma di masyarakat sekarang yang lebih peduli terhadap pembangunan manusia berbasis penguatan anggota keluarga. Oleh karena itu diperlukan program pembinaan kader PKK yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan kebutuhan masyarakat di masa kini. Sehingga kami menawarkan kegiatan sarasehan sebagai salah satu alternatif pendidikan non-formal sebagai kami anggap sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan belajar para kader PKK. Adapun prosedur kegiatan yang dilaksanakan tim pelaksana dalam pengabdian dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Prosedur Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan gambar 4 di atas maka setiap komponen dapat dijelaskan melalui paparan berikut ini:

- a) *Input*: Komponen input berisikan sumberdaya manusia (karakteristik dan minat belajar) dari para kader PKK di Desa Karangkamiri pada saat ini. Penentuan ini merupakan hasil identifikasi kebutuhan belajar yang dilaksanakan pada tahapan sebelumnya (tahap perencanaan).
- b) *Process*: Komponen proses merupakan aktualisasi pelaksanaan program di lapangan yakni sarasehan dalam upaya perlindungan keluarga, yang kemudian dilaksanakan evaluasi setelah kegiatan sarasehan berlangsung;
- c) *Output*: Komponen output merupakan hasil yang ingin dicapai oleh tim pelaksana pengabdian melalui program sarasehan dalam upaya perlindungan keluarga yang diharapkan dapat tercapai dalam tiga jangka waktu. Adapun hasil yang diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini yakni: para kader PKK dapat perolehan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan tufoksinya di masyarakat, tumbuhnya sikap percaya diri untuk untuk melakukan tugasnya sebagai agen pemberdaya masyarakat dalam lingkup keluarga (jangka pendek), berkolaborasi dengan masyarakat (jangka menengah), serta tumbuhnya kesiapan diri dan kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kerentanan keluarga yang ada di masyarakat (jangka panjang). Setelah selesainya pembelajaran yang dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan pendampingan dan konsultasi peluang usaha;
- d) *Outcome*: Komponen ini merupakan dampak dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan para kader PKK akan mampu: 1) mengidentifikasi kerentanan keluarga; 2) merancang program preventif dalam upaya perlindungan keluarga; membangun dan memperkuat ketahanan keluarga di masyarakat setempat, khususnya di Desa Karangkamiri.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

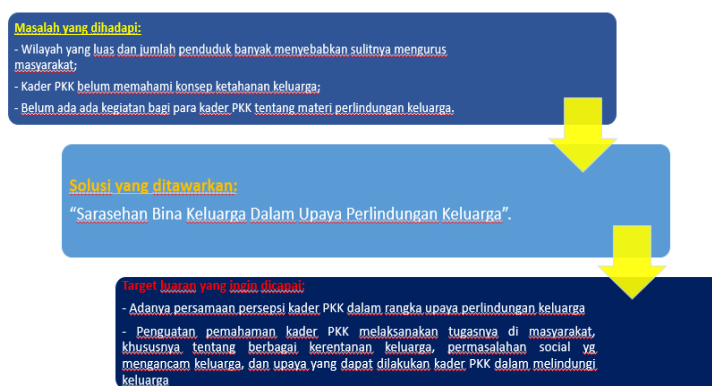
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Februari, berlokasi di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Pada pelaksanaannya diawali dengan penyampaian materi tentang kerentanan pada keluarga, masalah sosial yang mengancam keluarga, hingga upaya yang dapat dilakukan kader PKK dalam melindungi keluarga. Kegiatan sarasehan ini ditujukan bagi para kader PKK yang aktif melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan masyarakat di Desa Karangkamiri. Sarana yang digunakan untuk bahan penayangan materi sarasehan ini adalah sarana seperangkat LCD, proyektor, soundsystem yang tersedia di aula Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Adapun durasi materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi kerentanan pada keluarga (3 x 50 menit)
2. Materi masalah sosial yang mengancam keluarga (3 x 50 menit)
3. Materi upaya yang dapat dilakukan kader PKK dalam melindungi keluarga (3 x 50 menit).



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Sarasehan

Selanjutnya gambaran terkait skema masalah yang dihadapi oleh mitra (TP PKK) di Desa Karangkamiri berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan maka masalah yang dihadapi terkait dengan upaya perlindungan keluarga setidaknya ada tiga hal, yakni: wilayah Desa Karangkamiri yang luas dan jumlah penduduk banyak menyebabkan sulitnya mengurus masyarakat, kader PKK belum memahami konsep ketahanan keluarga, belum ada ada kegiatan bagi para kader PKK tentang materi perlindungan keluarga. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh tim pengabdian yakni “Sarasehan Bina Keluarga Dalam Upaya Perlindungan Keluarga”. Target luaran pengabdian yang hendak dicapai oleh tim pengabdian yakni: adanya persamaan persepsi kader PKK dalam rangka upaya perlindungan keluarga, adanya penguatan pemahaman kader PKK melaksanakan tugasnya di masyarakat, khususnya tentang berbagai kerentanan keluarga, permasalahan social yang mengancam keluarga, upaya yang dapat dilakukan kader PKK dalam melindungi keluarga disekitarnya hingga publikasi jurnal ilmiah. Adapun skema masalah, solusi, dan target luaran dapat dijelaskan melalui gambar 6 di bawah ini:



Gambar 6. Skema Masalah, Solusi, Dan Target Luaran

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa pembinaan bagi para kader PKK tentang pentingnya perlindungan keluarga ternyata berhasil dilakukan. Ini terbukti dari timbulnya kesadaran para kader PKK bahwa upaya perlindungan keluarga merupakan hal pentingnya dan munculnya kebutuhan belajar baru terkait kemampuan deteksi dini kerentanan keluarga dari berbagai macam gangguan yang mengintai ketahanan keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan upaya pendampingan yang selaras dan komprehensif, yang didukung oleh banyak pihak, demi keberlanjutan program pembinaan keluarga sehingga para kader PKK dapat secara maksimal mencegah beragam kerentanan yang ada di keluarga dan sekitarnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka, rekomendasiny adalah sebagai berikut:

1. Upaya pendampingan yang selaras demi keberlanjutan program bina keluarga, melalui sinergitas dan optimasi berbagai pihak untuk mendukung kinerja kader para kader PKK di Desa Karangkamiri;
2. Para kader PKK perlu didorong dan difasilitasi untuk belajar dan menggunakan keterampilan baru guna mengembangkan strategi koping yang memadai untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi yang dapat membantu mereka menghadapi stressor di keluarga dan dilingkungan sekitarnya;
3. Pentingnya upaya penguatan pemahaman bagi para kader PKK terutama terkait ketahanan keluarga, sehingga mereka mampu mengidentifikasi berbagai kerentanan keluarga yang ada di keluarga dan sekitarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Kepala Desa Karang Kamiri, Ketua TP PKK Desa Karangkamiri yang membantu tim pelaksana pengabdian untuk menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat ditahun ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Averria Sirkin Martin, Brian J. Distelberg & Joana Abed Elahad. (2015). The Relationship Between Family Resilience and Aging Successfully, *The American Journal of Family Therapy*, 43:2, 163-179, DOI: 10.1080/01926187.2014.988593.
- Aziz, S. (2015). *Pendidikan Keluarga: Konsep Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- BP3AKB. (2014). *Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat*. Bandung: BP3AKB.
- Dahniar, Eulis. (2014). Peran Penting Pemberdayaan Perempuan (PKK) Dalam Upaya Mengatasi Masalah Kesehatan di Masyarakat. Disampaikan pada Kegiatan PKM Penguatan Partisipasi Kader PKK dalam Penyebarluasan Informasi Kesehatan Kecamatan Tarogong Kaler Garut.
- Hawley, D. R., & Dehaan, I. (1996). Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives. *Journal of Family Process*, 35, 283–298.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu dengan mengesahkan motivator ketahanan keluarga (MOTEKAR).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Sunarti, E. (2001). *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan. Disertasi pada Program Studi Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga*. Program Pasca Sarjana IPB, Bogor. (Study of Family Strength: measurement development and analysis its influence on family pregnancy. PHd Dissertation on Bogor Agricultural University).
- Sunarti, E. (2014). *Modul Ketahanan Keluarga Bagi Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga di Jawa Barat)*. Bandung: BP3AKB.
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.